



Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Pada Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 s/d 2022

Hans Mangopo¹, Abdul Samad A², Mujahid³

¹ Mahasiswa Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

^{2,3} Dosen Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

Abstract

This research uses a descriptive method with a qualitative explanation. Researchers conducted intensive interviews with several informants who had been determined. Qualitative data was obtained through interviews with the leadership and some village staff as well as the community of Bangun Mulya Village, Waru Subdistrict, Penajam Paser Utara Regency and direct observation at the research site, then interpreted and presented in narrative form. The results showed that the impact of the distribution of village funds on community economic empowerment in Bangun Mulya Village has not been able to fully improve the economic empowerment of the community, the creation of independence, socio-economic participation, strengthening community capacity has not been achieved, then the supervisory function carried out from both the village and BPD has not been maximized, monitoring is only limited to identifying problems but has not evaluated progress and made efforts to adjust or improve for better business sustainability.

Keywords: Bangun Mulya Village; Village Fund; Effectiveness; Community Economic Empowerment.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptis dengan penjelasan kualitatif. Peneliti melakukan wawancara secara intensif kepada beberapa informan yang telah ditentukan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan beberapa staf desa serta masyarakat desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara serta melakukan observasi langsung di tempat penelitian, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari penyaluran dana desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Desa Bangun Mulya belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat penciptaan kemandirian, partisipasi sosial ekonomi, penguatan kapasitas komunitas belum tercapai kemudian belum maksimalnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan baik dari pihak desa maupun BPD, pemantauan baru sebatas mengidentifikasi persoalan tetapi belum melakukan evaluasi kemajuan dan melakukan upaya penyesuaian atau perbaikan-perbaikan demi keberlanjutan usaha yang lebih baik.

Kata Kunci: Desa Bangun Mulya; Dana Desa; Efektivitas; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Article info

Received (18/09/2024)

Revised (25/10/2024)

Accepted (13/11/2024)

Corresponding_ hansmangopo@gmail.com

DOI: 10.47354/mjo.v5i1

I. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Program penyaluran dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di pedesaan. Namun, efektivitas penyaluran dana desa masih menjadi perhatian karena terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan desa merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Dana Desa merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mensukseskan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Selain dari pendapatan asli desa, pendapatan desa bersumber dari keuangan pusat dan keuangan daerah. Keuangan pusat berarti alokasi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan belanja negara). Sedangkan keuangan daerah berarti alokasi dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemerintah Indonesia mengucurkan dana kepada desa dengan jumlah yang dapat dikatakan cukup banyak. Dari tahun ke tahun jumlah dana desa mengalami peningkatan.

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat tiap tahunnya, maka dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan efektif. Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Program pemberdayaan masyarakat memiliki maksud dan tujuan yang bermanfaat untuk perbaikan kehidupan masyarakat, menurut Aprillia, dkk (2012) tujuan pemberdayaan ialah untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas yang baik, perbaikan dalam bertindak (better action) dilanjutkan perbaikan kelembagaan dan usaha sehingga mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan lingkungan. Dengan usaha-usaha perbaikan kehidupan yang dilakukan masyarakat itu sendiri yang akan membuatnya jauh lebih sejahtera. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam pengelolaan dana desa dengan seefektif mungkin Perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Musyawarah Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. pembangunan partisipatif yaitu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh Kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Beberapa kendala yang perlu diperhatikan dalam penyaluran dana desa adalah:

1. Pengelolaan yang Tepat, Efektivitas penyaluran dana desa sangat tergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut dengan baik. Jika pengelolaan tidak tepat, maka anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi bisa saja disalah gunakan atau tidak mencapai sasaran dengan baik.
2. Partisipasi Masyarakat, Partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan penggunaan dana desa menjadi kunci keberhasilan. Jika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan, kegiatan yang dilakukan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia, Tingkat kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa perlu ditingkatkan agar dapat mengelola dan menggunakan dana desa secara efektif. Pelatihan dan pendampingan perlu diberikan agar mereka memiliki pemahaman tentang pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program.
4. Transparansi dan Akuntabilitas, Proses penyaluran dana desa perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Jika terjadi praktik korupsi atau penyalahgunaan dana, maka efektivitas program akan terganggu.
5. Diversifikasi Sumber Pendapatan, Selain penyaluran dana desa, penting juga untuk mendorong diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberdayakan potensi lokal, pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
6. Sinergi Program Pembangunan, Pengelolaan dana desa perlu diintegrasikan dengan program pembangunan lainnya yang ada di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Sinergi ini dapat memperkuat upaya peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi efektivitas penyaluran dana desa dan peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan dana desa dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dipedesaan, pemerintah Indonesia melalui program Dana Desa telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan dana yang dikucurkan langsung kepada desa-desa untuk membiayai

berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Arah dan strategi kebijakan Pembangunan desa dan pedesaan pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi-misi presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Salah satu Upaya yang dilakukan antara lain melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada peningkatan ekonomi Masyarakat di desa dan pengentasan kemiskinan. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat. Proses otonomisasi yang telah digalakkan sejak Tahun 1999 hingga saat ini yang meliputi berbagai aspek peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan seharusnya memberikan dampak yang signifikan. Artinya mestinya terlihat dengan jelas peningkatan Pembangunan dan kesejahteraan desa dan Masyarakat secara nyata.

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan biaya yang cukup untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Sejak Tahun 1999, yaitu sejak penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Sebagai yang dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan paket Pemerintahan Daerah yang esensinya ditetapkan secara strategis demi keberpihakan kepada Masyarakat local di daerah. Namun, Efektivitas penyaluran dana desa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan penyaluran dana desa yang tidak efektif dapat mengakibatkan pemborosan, penyalahgunaan, atau bahkan tidak tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas penyaluran dana desa. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah mekanisme penyaluran dana desa yang transparan dan akuntabel. Mekanisme ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa, serta adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan rencana pembangunan desa yang partisipatif, dimana masyarakat desa terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, pengawasan yang efektif juga menjadi faktor penting dalam penyaluran dana desa. Pemerintah dan masyarakat desa perlu bekerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam memastikan Efektivitas penyaluran dana desa. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada desa-desa, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, tentunya ada langkah-langkah untuk mengukur efektif tidaknya program dana desa. Karena pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam hal ini penting agar pengelolaan dana desa dapat didukung oleh perangkat desa dalam rangka pelaksanaan program-program prioritas metrik penting untuk mendorong para pemimpin. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan penguatan perekonomian masyarakat. Selain dari pihak pemerintah dan masyarakat desa sendiri, kendala pelaksanaan program dana desa dapat muncul dari pihak eksternal dan konteks sosial masyarakat. Harus dapat ditemukan solusi yang tepat agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi sehingga pengelolaan sumber daya desa dapat lebih optimal

Dengan adanya mekanisme penyaluran dana desa yang efektif, diharapkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai dengan baik. Masyarakat desa akan merasakan manfaat langsung dari penggunaan dana desa, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, Efektivitas penyaluran dana desa juga dapat memberikan dampak positif terhadap pemangunan infrastruktur di pedesaan. Dengan adanya dana desa yang efektif, desa-desa dapat membangun jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas public lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu juga, peyaluran dana desa yang efektif juga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan usaha mikro, pelatihan keterampilan dan pengembangan potensi lokal. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Namun untuk mencapai Efektivitas penyaluran dana desa, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat

desa, dan Lembaga terkait lainnya. Pemerintah perlu memberikan bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Masyarakat desa juga perlu aktif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang selalu tanggap terhadap pemenuhan tuntutan desa, menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah daerah untuk bagaimana memotivasi pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu Kabupaten yang menerima kucuran dana desa cukup besar setiap tahunnya dari pemerintah pusat sehingga menjadi hal yang penting bagaimana untuk memanfaatkan dana desa tersebut bagi peningkatan infrastruktur di desa dan juga bagaimana pula melalui dana desa ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Tabel 1. Daftar Desa di Kecamatan Waru Kab. Penajam Paser Utara

NO.	NAMA DESA
1.	Bangun Mulya
2.	Sesulu
3.	Api-api

Sumber : Kecamatan Waru

Desa Bangun mulya adalah salah satu desa yang berada dibawah Kecamatan Waru yang memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk yang mana dulunya adalah wilayah transmigrasi yang dihuni sebagian besar pendatang dari daerah Jawa. Pemerintah desa Bagun Mulya mendapatkan bantuan dana desa setiap tahunnya dari pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara hal ini menjadi tantangan buat pemerintah desa Bangun Mulya untuk bagaimana mengelola dana tersebut melalui perencanaan program yang dibuat sehingga dapat berdampak positif bagi pengembangan wilayah desa baik dari segi infrastruktur desa maupun dalam hal ikut melibatkan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa sehingga dapat menambah nilai ekonomis bagi masyarakat desa.

Tabel 2. Pengalokasian Dana Desa di Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru

TAHUN	PENGALOKASIAN DANA DESA
2018	Rp. 3.754.328.996
2019	Rp. 4.412.607.860
2020	Rp. 4.357.708.980
2021	Rp. 4.408.987.578
2022	Rp. 3.758.586.083

Sumber : Bagian keuangan Desa Bangun Mulya

Berdasarkan tabel 1.2 pengalokasian dana desa diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana desa yang dikucurkan untuk desa Bangun Mulya Kecamatan Waru mengalami fluktuasi mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 tahun 2018 sebesar Rp. 3.754.326.996 dan pada Tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 4.412.607.860 dan pada Tahun 2020 menurun sebesar Rp. 4.357.708.980 dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 4.408.987.578 namun pada Tahun 2022 mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan yaitu dikucurkan dibawah tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.758.586.083 hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 yang mana terdapat rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Penajam Paser Utara. Dan ditahun 2022 sebagian besar anggaran digunakan untuk membantu masyarakat desa dalam meringankan beban masyarakat akibat terkena Dampak Covid melalui kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan efisien. Itu mengacu sejauh mana suatu tindakan, program, atau usaha hasil dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks manajemen, Efektivitas seringkali dibandingkan dengan efisiensi, yang mencakup sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal. Efektivitas seringkali diukur dengan mengukur sejauh mana tujuan atau target yang telah ditetapkan berhasil tercapai. Hal ini berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan dan apakah suatu tindakan atau kebijakan berhasil dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah Efektivitas. Menurut Effendi (2008) mendefinisikan Efektivitas sebagai berikut: “komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Indikator Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Admosoeprapto (2016) menyebutkan beberapa indikator dalam mengukur efektivitas yaitu Kemampuan organisasi, Kualitas kerja, Kuantitas kerja, Tepat waktu, dan Kepuasan kerja.

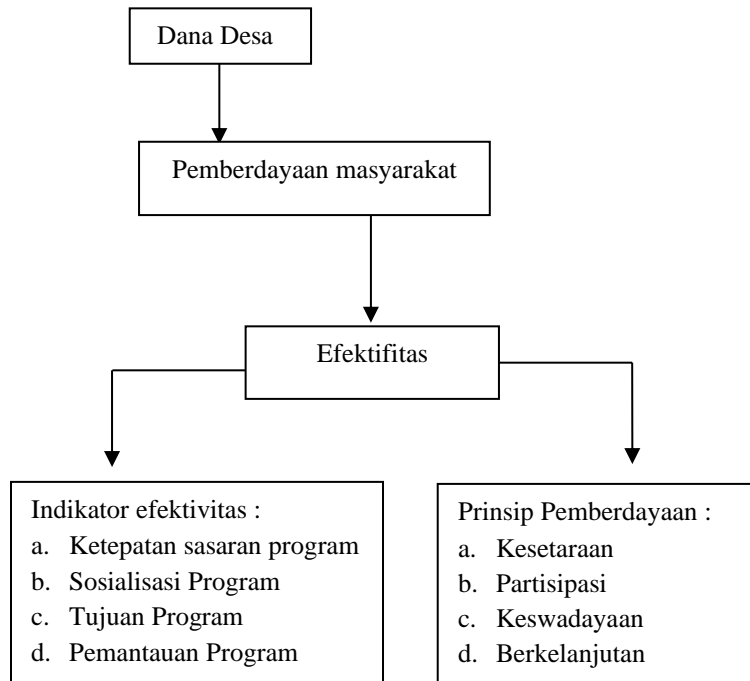
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat. Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasatwisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi. Pemberdayaan menurut Eko Sudarmanto dkk (2020) pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya Meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya.

Dalam melihat program dan kegiatan pemberdayaan ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan ukuran yang digunakan dalam setiap pelaksanaannya yang dinamakan juga sebagai prinsip pemberdayaan. Terdapat beberapa prinsip utama dalam pemberdayaan masyarakat yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dari program pemberdayaan (Najiyati, dkk, 2005) yaitu Kesetaraan, Partisipasi, Keswadayaan atau Kemandirian, dan Berkelanjutan.

Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah merupakan model pemikiran mengenai bagaiman teori-teori yang saling berhubungan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga dapat diidentifikasi sebagai suatu persoalan yang utama. Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini ialah bagaimana menganalisis tentang efektifitas penyaluran dana desa terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penyaluran dan apa saja yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh sebab itu untuk lebih mempermudah penelitian yang akan dilakukan serta memperjelas konsep pemikiran dalam penelitian ini, pembangunan fisik dan pemberdayaan adalah dua hal yang menjadi kegiatan utama dalam pengalokasian dana desa pembangunan sarana dan prasarana umum didesa terutama jalan dan jembatan dan prasarana pendukung lainnya. Oleh karenanya pembangunan fisik tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat oleh karena itu untuk mengetahui efektifitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan evaluasi. Hal ini merupakan indikator untuk mengukur efektifitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Mengusulkan indikator efektifitas dengan fokus pada penetapan tujuan program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Setelah dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut, kemudian dikaji ulang dengan menggunakan metode yang dijelaskan oleh Najiyati dkk. Prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi yang diusulkan dipertimbangkan yaitu Prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan keberlanjutan. kemudian hal tersebut dapat digambarkan skema kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan pendekatan dengan Penelitian Kualitatif bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap efektifitas penyaluran dana desa terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Desa dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu dan penghambat dalam pelaksanaannya pada Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penelitian kualitatif dipakai untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering kali digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan "analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian tidak akan berarti jika tidak diolah, dianalisis dan disajikan secara sistematis. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, kemudian dilanjutkan pada saat peneliti berada dilapangan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru, itu artinya kesimpulan sampai pada titik jenuh.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selain itu seperti yang dinyatakan oleh moleong (2005), metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

IV. HASIL/TEMUAN

Indikator Efektivitas

Indikator Efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu program, proses atau tindakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang diharapkan dan bahwa strategi yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah dipilih yang meliputi Kepala Desa beserta aparatur dan Anggota BPD serta masyarakat desa Bangun Mulya, dapat dilihat keefektifan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, indikator yang digunakan adalah yang ditegaskan oleh Sugiono dan Budiani (2007), dimana ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat keefektifan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Melihat sejauh mana program yang telah disusun dan dilaksanakan sebelumnya telah direalisasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, memahami dengan jelas kebutuhan kelompok sasaran sebelum merancang program agar program yang akan dilaksanakan relevan atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. akan tetapi program-program yang dibuat juga merupakan aspirasi atau usulan-usulan yang disampaikan dari masyarakat melalui musrenbangdes. Dalam hal pemberdayaan masyarakat semua program kegiatan yang direalisasikan sebagian besar merupakan usulan dari masyarakat diantaranya kegiatan pelatihan/ di bidang pertanian, perikanan, dan termasuk Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif yaitu industri membuat hal ini sesuai dengan Penyampaian :

“...Sebagai pimpinan desa yang baru dilantik melihat kondisi desa mempunyai potensi sumberdaya alam cukup besar untuk dikembangkan khususnya dibidang pertanian dan perkebunan sehingga perlu memanfaatkan potensi tersebut demi kesejahteraan warga desa setempat tinggal bagaimana memfasilitasi dengan dukungan dana desa yang ada. kegiatan pemberdayaan yang sudah berjalan perlu lebih ditingkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, beberapa program masih konsisten dilaksanakan adalah kegiatan membuat, dan beberapa kegiatan yang lain memang perlu dipikirkan keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan tersebut khususnya dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha masyarakat desa. Selain itu juga kami akan fokus untuk mengaktifkan kembali Bumdes sehingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah jalan bisa disinergikan dengan usaha-usaha di bumdes sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa...” (B, 42 Tahun)

“...sebagian besar usulan program kegiatan yang masuk dalam musrenbang adalah berasal dari masyarakat desa yang mengharapkan adanya pelatihan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menyesuaikan potensi ekonomi yang ada dimasyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada masyarakat diolah sedemikian rupa untuk menjadi nilai tambah ekonomis bagi masyarakat. Kami juga melakukan pemantauan dan evaluasi selama pelaksanaan memang ada beberapa kendala yang dihadapi seperti konsistensi dan kekompakan dari anggota kelompok usaha sehingga perlu diberikan motivasi agar tetap tekun berusaha dengan beberapa terobosan yang dilakukan. Bumdes belum maksimal berjalan disebabkan pengurus yang belum maksimal dalam mengembangkan unit usaha yang ada sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh...” (MI, 41 Tahun)

Dari semua kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Bangun mulya aparatur desa yang bertindak sebagai fasilitator sangat terbuka dalam menerima dan merekrut peserta yang akan dilatih.

“...warga sangat antusias mendaftar dan mengikuti pelatihan dengan informasi disampaikan kepada wargan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi warga sekitar. Semua warga yang mau mengikuti kegiatan akan diberikan kesempatan untuk turut serta berpartisipasi terutama bagi warga yang mempunyai waktu yang luang, ada beberapa warga yang belum memahami maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut setelah diberikan penjelasan baru mereka paham maksud dari kegiatan yang dilaksanakan...” (ADMP, 30 Tahun)

Dari hasil wawancara dengan masyarakat di desa Bangun Mulya yang juga sebagai informan, semua diberikan kesempatan untuk terlibat di dalamnya. tetapi ada juga yang tidak bisa mengikuti karena kesibukan pekerjaan sebagai PNS. Jadi untuk ketepatan program yang dibiayai melalui dana desa cukup efektif karena penjangkauan pesertanya jelas, terbuka serta tepat sasaran.

2. Sosialisasi Program

Melihat kemampuan penyelenggaraan dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi yang tentang pelaksanaan program dapat terkomunikasikan kepada masyarakat secara umum dan peserta dengan media komunikasi, pertemuan langsung untuk menyampaikan informasi. Melakukan identifikasi dengan menentukan kelompok sasaran yang akan diberdayakan dalam kegiatan pemberdayaan. Seperti kata :

"...Setiap masyarakat yang akan mengikuti kegiatan akan diinfokan melalui media FB dan Group Wa baik yang terdiri dari grub perdusun dan juga perdesa secara umum, jadi jika ada kegiatan akan diinformasikan secara terbuka di Group WhatsApp dengan tujuan agar informasi yang disampaikan dapat cepat nyampai, tepat sasaran dan merata. Warga desa memang tidak semua memiliki perangkat smart phone yang mempunyai aplikasi FB atau WhatsApp, namun mereka tidak merasa ketinggalan informasi karena karena informasi juga sampai kepada mereka dengan cepat karena aparaturnya desa yang langsung datang kerumah, maupun kepala Rukun Tetangga yang juga mendatangi rumah warganya. Sebagian besar yang diundang adalah ibu-ibu rumah tangga yang serta pemuda-pemudi yang belum mempunyai pekerjaan.."(YNA, 40 Tahun)

Setiap aparaturnya desa yang bertugas mengakui bahwa dengan adanya fasilitas perangkat smart phone sangat membantu memudahkan pekerjaan mereka sebab sangat menghemat waktu sehingga pekerjaan mereka sangat efisien. Sehingga dalam hal ini, sosialisasi program dapat dikatakan baik dan cukup efektif.

3. Tujuan Program

Sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap program kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan pastii mempunyai tujuan tertentu bagi masyarakat pada umumnya dan peserta pada khususnya. Seperti yang dikatakan oleh :

"...Program-program pelatihan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat dan setiap akhir pelaksanaan peserta diberikan uang transport. Dari hasil kegiatan pelatihan tersebut telah terbentuk beberapa kelompok sesuai dengan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri diantaranya ada kelompok membuat yang sudah berjalan dan bisa mandiri mengelola usahanya sendiri dan memasarkan usahanya dengan memanfaatkan aplikasi media sosial namun disayangkan belum bisa sinergi dengan bumdes sehingga belum dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa begitupun dengan usaha-usaha yang lain seperti usaha pembuatan kue berbahan umbi-umbian, Sablon batik dan menjahit yang berusaha mengembangkan usahanya walaupun terdapat kendala-kendala internal yang dihadapi dalam kelompok sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk dapat tetap berjalan dan mengembangkan usahanya.."(ADMP, 30 Tahun)

Pada kriteria yang ketiga ini, dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan menggunakan dana desa masih belum cukup efektif karena tujuan dari program dengan pencapaian masih cukup jauh, penciptaan kemandirian, partisipasi sosial ekonomi, penguatan kapasitas komunitas belum tercapai, dalam hal ini untuk membangkitkan ekonomi rakyat masih perlu pemahaman dari warga karena warga masih mengharapkan feedback berupa uang transportasi. Akan tetapi para perangkat desa yang menjadi informan sepakat bahwa hal-hal demikian akan dicarikan solusi bersama dan akan melakukan pengembangan kegiatan dimasa mendatang.

4. Pemantauan Program

Kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Setelah program yang dilaksanakan berjalan, maka menjadi kewajiban dari perangkat desa atau pun fasilitator agar dapat melihat sejauh mana perkembangan dari masyarakat setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. seperti kata :

"...Kami telah melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana desa termasuk didalamnya kegiatan pemberdayaan masyarakat memang banyak kendala yang dihadapi salah satunya kurang SDM yang serta kemudian distribusi pemasaran yang telah dibina melalui kegiatan pemberdayaan, salah satu tugas kami melakukan fungsi pengawasan di desa perlu melakukan pemantauan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilapangan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada kepala desa sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.."(ASW, 50 Tahun)

"...Masyarakat juga mempunyai fungsi pengawasan secara umum bisa memberikan masukan dalam hal pemberdayaan melalui pertemuan-pertemuan resmi di kantor desa sehingga terdapat Cek and Balance dalam pelaksanaannya.."(JW, 48 Tahun)

Pada kriteria yang keempat ini, dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantauan pelaksanaan program belum cukup efektif hal ini terlihat dari belum maksimalnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan baik dari pihak desa maupun BPD, pemantauan baru sebatas mengidentifikasi persoalan tetapi belum melakukan evaluasi kemajuan dan melakukan upaya penyesuaian dan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan keberhasilan program.

Matriks Intisari temuan

Tabel 2. Matriks intisari temuan

Variabel Efektivitas	Hasil Kualitatif	Interpretasi Peneliti
Ketepatan sasaran program	Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan melihat potensi sasaran melibatkan ibu-ibu rumah tangga dan pemuda-pemuda yang belum bekerja sehingga terbentuk kelompok-kelompok usaha yang ada sampai sekarang diantaranya kelompok usaha membuat Sekar Buen, kelompok Menjahit Arunila, Usaha Umbikoe dan Sablon batik.	Dari hasil wawancara mendalam dilihat dari sisi sasaran program kegiatan belum cukup efektif pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa Bangun Mulya telah menitik beratkan pada kelompok sasaran seperti Ibu-ibu rumah tangga dan pemuda-pemudi yang belum mempunyai pekerjaan namun belum menggali lebih dalam potensi-potensi ekonomi lain yang ada di dalam lingkungan desa Bangun Mulya sehingga bisa berdayakan.
Sosialisasi program	Program kegiatan yang dilaksanakan diinformasikan melalui media FB dan Group Wa baik yang terdiri dari grub perdesun dan juga perdesa secara umum, jadi jika ada kegiatan akan diinformasikan secara terbuka di Group WhatsApp dengan tujuan agar informasi yang disampaikan dapat dengan cepat sampai dan merata	Dari hasil wawancara mendalam disimpulkan bahwa Sosialisasi program dilaksanakan secara merata, kepada semua warga disetiap Rukun Tetangga maupun dusun yang ada desa menggunakan sarana media sosial maupun kunjungan langsung
Tujuan program	program-program pelatihan telah dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi yang ada, telah terbentuk beberapa kelompok usaha namun belum sepenuhnya bisa berkembang secara mandiri. Namun belum bersinergi dengan Bumdes yang ada di desa sehingga belum berdampak pada peningkatan PAD desa. dalam setiap pelaksanaan pelatihan masih diberikan uang transport sebagai feedback.	Dari hasil wawancara mendalam disimpulkan bahwa tujuan dari program dengan pencapaian masih cukup jauh, penciptaan kemandirian, partisipasi sosial ekonomi, penguatan kapasitas komunitas belum tercapai, dalam hal ini untuk membangkitkan ekonomi rakyat masih perlu pemahaman dari warga karena warga masih mengharapkan feedback berupa uang transport. Kontribusi dari kegiatan yang usaha yang sudah mandiri belum bersinergi dengan Bumdes sehingga belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa
Pemantauan program	Pemantauan program telah dilaksanakan terhadap penggunaan dana desa termasuk didalamnya kegiatan pemberdayaan masyarakat ditemukan banyak kendala yang	Dari hasil wawancara mendalam disimpulkan bahwa program belum cukup efektif hal ini terlihat dari belum maksimalnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan baik dari pihak

	dihadapi salah satunya kurangnya SDM	desa maupun BPD, pemantauan baru sebatas mengidentifikasi persoalan tetapi belum melakukan evaluasi kemajuan dan melakukan upaya penyesuaian dan perbaikan-perbaikan
--	--------------------------------------	--

Indikator Prinsip Pemberdayaan

Dari semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh desa Bangun Mulya Kecamatan Waru baik itu berupa kegiatan pendampingan maupun pelatihan-pelatihan, yang menghasilkan baik itu kerajinan membuat maupun produk UMKM lainnya yang telah disampaikan oleh perangkat desa dan juga masyarakat desa yang telah dilakukan wawancara. Ada beberapa prinsip pemberdayaan yang dapat menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan adalah prinsip dasar yang harus dikedepankan dalam tahapan pemberdayaan yang mana adanya kesetaraan atau kedudukan yang sama antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam hal menyampaikan ide atau gagasan akan selalu diterima dengan terbuka tanpa membandingkan atau melihat posisi atau jabatan baik sebagai perangkat desa maupun masyarakat umum.

"...Yuni Nurhayati (Sekretaris desa), Dalam setiap kegiatan yang diusulkan dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan di desa tidak pernah membanding-bandingkan baik itu untuk kegiatan perempuan maupun laki-laki. Semua diberikan kesempatan yang sama, memang tidak semua warga bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan karena kesibukan masing-masing warga, sebahagian besar kegiatan pelatihan diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga dan pemuda-pemuda yang belum mempunyai pekerjaan..." (YNA, 40 Tahun)

Pada saat Pelaksanaan kegiatan, juga tidak melihat apakah warga yang bersangkutan mampu tau tidak mampu, karena tujuan dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ialah memperdayakan masyarakat yang kurang mampu. Pada beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan kehadiran kaum laki-laki memang dirasakan kurang hal ini disebabkan kaum laki-laki banyak melaksanakan aktifitas pertanian khususnya penanaman kelapa sawit dan padi. Akan tetapi pada prinsip kesetaraan telah terpenuhi merujuk pada kegiatan yang dilaksanakan dari mulai pengusulan program kegiatan sampai pada pelaksanaan sangat direspon baik oleh semua unsur masyarakat, baik yang laki-laki atau perempuan, mampu atau yang tidak mampu maupun juga perangkat desa maupun masyarakat desa.

2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat memacu kemandirian masyarakat adalah program pembangunan yang mencakup partisipasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi serta monitoring. Partisipasi masyarakat desa Bangun Mulya dalam program pemberdayaan cukup tinggi sehingga hal tersebut perlu terus ditingkatkan dengan dibarengin dengan pendampingan yang serius baik dari perangkat desa maupun dari tenaga ahli yang digunakan.

"...Dari sekian banyak penduduk desa bangun Mulya punya mata pencarian yang berbeda-beda serta kemampuan masyarakat yang berbeda serta tingkat antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan pelatihan disertai dengan tim pendamping yang tugaskan untuk mendampingi cukup tinggi khususnya bagi kaum wanita karena sebagian besar kaum pria kebanyakan bekerja sebagai sebagai petani dan pekerja kebun sawit diperusahaan yang ada di daerah sekitar desa bangun mulya." Dalam setiap pelatihan yang dilaksanakan akan diberikan uang saku sebagai pengganti transpor.." (SK, 30 Tahun)

Pada prinsip ini tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pendampingan atau pelatihan cukup tinggi dengan didukung tenaga pendamping yang berkompeten dan memiliki komitmen dalam bidang pemberdayaan. Maka dalam hal ini perlu lebih ditingkatkan lagi partisipasi melalui sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat.

3. Keswadayaan dan kemandirian

Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kendala-kendala tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal

dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang dengan tujuan agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat.

"... Saya tergabung dalam Usaha menjahit didirikan tahun 2022 Beranggotakan awalnya 15 orang namun dalam perjalanannya tinggal 5 orang, ini disebabkan waktu yang terbagi yang dimiliki oleh setiap anggotanya dan juga kurang kekompakan sehingga sebagian besar anggotanya mengundurkan diri karena kesibukan masing-masing diluar. Peralatan menjahit masih disediakan oleh desa karena kelompok usaha ini belum bisa membeli sendiri peralatan yang dibutuhkan. Produk yang dihasilkan biasanya bekerjasama dengan usaha Sekar Buen dalam pengelolaannya dengan memberikan pesanan kain kepada kelompok menjahit untuk dijahit dan pasarkan oleh kelompok usaha Sekar Buen..." (J, 35 Tahun).

Hal ini menegaskan bahwa kelompok usaha yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan di desa belum bisa berdiri sendiri masih sepenuhnya bergantung pada desa sebagai fasilitator. Perlu pendampingan lebih lanjut terutama dalam hal penguatan didalam internal kelompok usaha itu sendiri agar bisa berbenah sehingga tidak selalu bergantung kepada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat itu sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Prinsip ini adalah penentu dari tingkat pemberdayaan yang telah dicapai karena tanpa berkelanjutan maka kegiatan apa saja yang dilaksanakan tidak dapat dikatakan sebagai pemberdayaan.

Misalnya dalam kegiatan pembuatan kripik atau kegiatan sablon batik, Setelah kegiatan dilaksanakan masyarakat berinisiatif untuk melanjutkan sampai pada tahap pemesanan atau pemasarannya ke konsumen bahkan diharapkan dapat membentuk usaha sendiri untuk membuat usaha mandiri dengan mengurus ijin usaha sendiri jika hal tersebut terjadi maka ekonomi masyarakat akan meningkat dan produktif sehingga masyarakat tidak tergantung kepada pendamping lagi.

"...Saya tergabung dalam usaha Umbikoe Adalah salah satu usaha yang didirikan sejak tahun 2022 yang mana pada saat pembentukan kelompok usaha berjumlah 3 kelompok yang mana 1 kelompok berjumlah 10 orang dan sampai sekarang usaha tersebut hanya tinggal 1 Kelompok yang bertahan hal tersebut disebabkan karena kesibukan dan kurangnya kebersamaan dari masing-masing anggotanya. Adapun produk yang ditawarkan berupa Kue Bapia, Kue Bolu, Kue Bolen, onde-onde, kue kukus yang semua bahannya berasal dari Umbi-umbian. Pemasaran dari produk umbikoe ini dilakukan secara online dan sering pula di pesan bila ada kegiatan-kegiatan pertemuan di desa Bangun Mulya. Nur Avaih berharap ke depan perlu pendampingan lebih lanjut agar usaha Umbikoe ini bisa tetap bertahan dan berkembang..."(NA, 38)

Maka dari hasil wawancara dan analisa berdasarkan indikator Efektivitas dan prinsip pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan bahwa dana desa belum cukup efektif dalam menjaga keberlanjutan. kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengasah kreatifitas masyarakat menjadi penting dan berkelanjutan menjadi salah satu prinsip utama dari beberapa prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, Karena tanpa keberlanjutan maka pemberdayaan tidak akan efektif.

V. PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Program

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyaluran dana desa terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa Bangun Mulya dilihat dari ketepatan sasaran program belum cukup efektif, ketepatan sasaran program merujuk pada sejauhmana sebuah program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari kelompok sasaran dengan melakukan identifikasi kebutuhan yang tepat, memahami dengan jelas kebutuhan kelompok sasaran sebelum merancang program, mempertimbangkan karakteristik kelompok sasaran. Dilihat dari sisi sasaran program kegiatan berupa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di desa Bangun Mulya telah menitik beratkan pada kelompok sasaran seperti Ibu-ibu rumah tangga dan pemuda-pemudi yang belum mempunyai pekerjaan namun belum menggali lebih dalam potensi-potensi ekonomi lain yang ada di dalam lingkungan desa Bangun Mulya. Dari hasil pelatihan tersebut melahirkan kelompok-kelompok usaha seperti membuat Sekar Buen, Kelompok Menjahit Arunila, Usaha Umbikoe dan Sablon batik namun sebagian besar belum berkembang secara mandiri masih terdapat persoalan-persoalan di internal kelompok usaha yang menjadi kendala dalam menjalankan operasional kegiatan diantaranya konsistensi dan keseriusan untuk mengembangkan usaha.

Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyaluran dana desa terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa Bangun Mulya dilihat dari sisi sosialisasi program cukup efektif, pemberdayaan

merupakan proses menyebarluaskan informasi dan pemahaman tentang program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok sasaran yang menjadi target yang akan diberdayakan. Dalam hal Sosialisasi Program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan di bawah bidang kesejahteraan rakyat menasar kelompok ibu-ibu rumah tangga dan pemuda-pemudi yang belum berpenghasilan dengan penyebaran informasi melalui media FB dan Group Wa baik yang terdiri dari grup perdesun dan juga perdesa secara umum, jadi jika ada kegiatan akan diinformasikan secara terbuka di Group WhatsApp dengan tujuan agar informasi yang disampaikan cepat sampai dan merata

Tujuan Program

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyaluran dana desa terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa Bangun Mulya dilihat dari Tujuan program belum efektif pemberdayaan merupakan cara meningkatkan kemampuan, kapasitas dan partisipasi individu atau kelompok untuk memiliki keterampilan, pengetahuan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan sehingga mereka lebih mandiri dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Membuka akses yang lebih luas kesempatan berusaha, membantu kelompok sasaran untuk menjadi lebih kuat dan mandiri dalam mengatasi tantangan dan peluang bersama, serta menciptakan perubahan yang berkelanjutan. tujuan dari program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan ekonomi melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan di desa Bangun mulya dilihat dari pencapaian masih cukup jauh, penciptaan kemandirian, partisipasi sosial ekonomi, penguatan kapasitas komunitas belum tercapai, dalam hal ini untuk membangkitkan ekonomi rakyat masih perlu pemahaman dari warga karena warga masih mengharapkan feedback berupa uang tranport. Kontribusi dari kegiatan yang usaha yang sudah berjalan belum bersinergi dengan Bumdes sehingga belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan (Gusmeri, M.T. dkk) yang menyatakan bahwa untuk membangkitkan ekonomi rakyat masih jauh dari yang diharapkan, masyarakat masih berharap insentif untuk setiap kegiatan pelatihan yang yang dilakukan.

Pemantauan Program

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyaluran dana desa terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa Bangun Mulya dilihat dari Pemantauan program belum efektif pemantauan program adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana, mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemantauan yang efektif memungkinkan penyelenggara program untuk melakukan identifikasi masalah dan hambatan, mengevaluasi kemajuan serta melakukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan keberhasilan program. Dalam hal pemantaun program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bangun Mulya belum cukup efektif hal ini terlihat dari belum maksimalnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan baik dari pihak desa maupun BPD, pemantauan baru sebatas mengidentifikasi persoalan tetapi belum melakukan evaluasi dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam meningkatkan keberhasilan program.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan indikator Efektivitas dan prinsip pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan bahwa penyaluran dana desa belum dikatakan efektif dalam hal meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada desa Bangun Mulya. tujuan dari program dengan pencapaian masih cukup jauh, sebagian besar anggaran yang dikucurkan masih tertuju pada pembangunan infrastruktur dasar yang ada didesa seperti jalan usaha tani, pembangunan jembatan desa dan perbaikan sarana umum desa belum fokus pada program peningkatan pemberdayaan masyarakat Dalam Indikator Efektivitas, dilihat dari pencapaian masih cukup jauh, dari hasil kegiatan pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan memang telah melahirkan beberapa kelompok usaha namun dalam perjalanannya belum mampu menciptakan kemandirian, partisipasi sosial ekonomi, penguatan kapasitas komunitas belum tercapai, belum maksimalnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan baik dari pihak desa maupun BPD, pemantauan baru sebatas mengidentifikasi persoalan tetapi belum melakukan evaluasi dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam meningkatkan keberhasilan program. Dan jika dipelajari prinsip pemberdayaan, maka dapat dikatakan tidak ada prinsip berkelanjutan yang dipenuhi sebagai dasar pemberdayaan. Berdasarkan hasil analisa, penyaluran dana desa masih belum efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Bangun Mulya.

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dicantumkan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu Kepala Desa dan BPD agar Melakukan pemantauan yang intensif terhadap program-program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi hal-hal yang menjadi persoalan dalam penguatan organisasi dan segera melakukan upaya-upaya perbaikan nyata sehingga tujuan program bisa terlaksana dan berkelanjutan. Bagi pemerintah desa Bangun Mulya, agar segera membenahi kembali BUMDes, memberdayakan kader-kader desa yang punya komitmen kuat untuk menuju desa yang mandiri bersinergi dengan kelompok usaha yang sudah terbentuk untuk membuat unit usaha yang bisa membantu perekonomian masyarakat desa. Bagi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong masyarakat desa untuk memberdayakan ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Admosoeprapto, K. (2016). *Produktifitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Gramedia. Jakarta.
- Effendy, O.U. (2007). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gusmeri, et al. (2019). Efektivitas Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Banda Aceh.
- Mardiasmo. (2017). *Efisiensi dan Efektivitas*. Andy. Jakarta.
- Sawaji, J., Suyuthi, N.F., Saleh, M., & Safar, I. (2023). The Role of Leadership Moderation in Explaining the Influence of Talent Management & Culture Organization on Employee Productivity of Pt. Sucofindo (Persero) Makassar Branch. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(11).
- Siagian, S.P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudarmanto, E., et al. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wahyu., Safar, I., Ramly, M., Amang, B., & Ramlawati. (2023). Honorary Teacher Phenomenology: The Role of Knowledge Management and Transformational Leadership. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(11).